

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan dari Penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa upaya Organisasi Internasional dalam menginternasionalisasikan isu pelanggaran HAM yang terjadi pada Daerah Operasi Militer di Aceh sejak tahun 1990-2004, masih dalam proses yang panjang dan berkelanjutan. Pelanggaran HAM pada Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM serius yang mestinya mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah, aktor-aktor negara yang lain, maupun dari dunia Internasional.

Sejak dinyatakan sebagai daerah yang mengalami kejahatan kemanusiaan, banyak NGO, baik lokal maupun internasional yang berupaya untuk memediasi, dan berusaha menjadi mediator agar terciptanya kestabilan keamanan di Aceh. NGO Internasional seperti *Henry Dunant Centre* (HDC) dan Kesepakatan CoHA (*Cessation of Hostilities Agreement* (Kesepakatan Penghentian Permusuhan) dan peran *Human Right Watch* (HRW), *Crisis Management Initiative* (CMI) dan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helinsky, serta NGO lokal seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam 'Aliansi Masyarakat Sipil Nusantara,' seperti Partai Rakyat Demokratik, HMI-MPO, dan Forum Rakyat, berupaya agar segala bentuk mediasi yang dilakukan oleh NGO tersebut dapat mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bertikai.

Kerjasama perdamaian yang dilakukan oleh NGO's Internasional, Pemerintah RI, dan GAM merupakan kerjasama yang alot dalam menyamakan keinginan dari kedua belah pihak. Baik GAM-RI dikhawatirkan tetap melakukan profokasi yang akan menimbulkan konflik kembali. Hal tersebut yang membuat Organisasi Internasional membawa serta Negara Negara tetangga seperti AS dan Jepang yang menginginkan menjadi bagian dari saksi atas penandatanganan kesepakatan. Bahkan Organisasi Internasional tidak melakukan perundingan di Indonesia, untuk menghindari saling kecurigaan antar kedua belah pihak.

Meskipun upaya perdamaian yang dilakukan oleh NGO/LSM lokal masih pada tahap yang berkelanjutan, baik mediator (NGO's), GAM, dan pemerintah RI mengupayakan untuk menghindari tindakan yang bersifat profokatif yang akan memancing konflik antara kedua belah pihak tersebut. Hingga saat ini, NGO's internasional tetap berkomitmen untuk terus "mendesak" dan "mengingatkan" pemerintah RI untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai Negara yang harus diberikan pada korban pelanggaran HAM di Aceh. Organisasi internasional juga mengupayakan agar kedua belah pihak yang bertikai, GAM-RI tetap mematuhi perjanjian dan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pemerintah sendiri telah menunjukkan itikad baik dengan memberikan hak otonom kepada Aceh untuk mengolah daerahnya sendiri, baik dalam ekonomi, pembangunan, hingga peraturan daerah. Hal ini diharapkan agar tidak memunculkan kesenjangan yang mengakibatkan terulang kembali tindakan-

tindakan anarkis separatis yang dilakukan oleh GAM. Dengan diberikannya otonomi penuh, pemerintah daerah tentu saja akan lebih mudah untuk mereperasi dan memperbaiki pembangunan infrastruktur di Aceh.

Meskipun demikian, organisasi internasional mengharapkan agar pemerintah RI segera menepati janji pada korban-korban pelanggaran HAM di Aceh, untuk memenuhi segala bentuk kerugian yang dialami oleh para korban pelanggaran HAM. Dengan memenuhi janji-janji tersebut setidaknya akan mengurangi rasa sakit dan trauma yang di alami oleh warga Aceh. Organisasi Internasional juga mengharapkan semua pihak agar terlibat untuk turut memantau agar perundingan damai tersebut dapat dipertahankan hingga akhir.

Dengan turut sertanya semua pihak dalam memantau dan turut menjaga serta mempertahankan perjanjian damai, diharapkan tidak ada lagi Aceh kelam seperti yang terjadi sebelumnya di Aceh. Sehingga Aceh dapat memperbaiki kondisi infrastruktur, mental, psikologi, dan kondisi traumatis yang dialami oleh sebagian masyarakat Aceh.